

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd. Rasyid Thaha. *Politik Hukum di Indonesia*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly. (2019). *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Baharuddin Badaru. *Hukum Tata Negara dan Pemerintahan Daerah*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Hadjon, Philipus M. (2015). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Peradaban.
- Huda, Ni'matul. (2017). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hamzah, A. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Huda, Ni'matul. (2020). *Teori dan Konsep Negara Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Irwansyah & Ahsan Yunus. *Hukum Tata Negara: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2018.
- Irwansyah. *Metode Penelitian Hukum: Pilihan, Paradigma, dan Praktik*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Irwansyah. *Pengantar Ilmu Hukum*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2017.
- Isra, Saldi. (2020). *Konstitusi dan Demokrasi: Dinamika Perubahan UUD 1945*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- La Ode Husen. *Hukum Tata Negara di Indonesia: Dinamika dan Perkembangannya*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2015.
- Manan, Bagir. (2018). *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Manan, Bagir. (2021). *Politik Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Marthen Arie. *Hukum Administrasi Negara*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, Adnan Buyung. (2015). *Demokrasi Konstitusional*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Ridwan HR (Dosen FH Unhas). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Ridwan HR. (2020). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Santoso, Topo. (2016). *Hukum Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sulaiman Jaya. *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2017.

Syarifuddin. *Hukum dan Etika Aparatur Sipil Negara*. Makassar: Unhas Press, 2019.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Abdullah. (2022). "Implementasi Konsep 'Cegah, Awasi, Tindak' dalam Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemilu 2019 (Studi Empiris pada Provinsi Jawa Barat)." *Jurnal Kajian Pemilu Bawaslu RI*, 3(1), 55–78.

Achmad R. "Kepastian Hukum dan Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Pidana ASN." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10 No. 1 (2021).

Andriani, L. (2021). Implementasi Netralitas ASN pada Pemilu 2019: Evaluasi dan Prospek. *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, 5(2), 134–150.

Arifin, R. (2021). Netralitas ASN dalam Perspektif Hukum Administrasi dan Hukum Pidana. *Jurnal Rechtsvinding*, 10(1), 45–62.

Astuti, Rini & Yudiansyah. (2020). "Peran Bawaslu dalam Mengawasi Netralitas ASN pada Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 133–150.

Badaru, Baharuddin. "Implementasi Prinsip Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26 No. 2 (2019).

Firmansyah, R. (2020). Dinamika Netralitas ASN dalam Perspektif Hukum Administrasi dan Disiplin Kepegawaian. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 151–170.

Handayani, S. (2019). Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada: Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Hukum Ius*, 7(2), 188–205

Hartono, B. (2020). Netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah: Analisis Yuridis dan Empiris. *Jurnal Hukum Ius*, 8(1), 33–49.

Hidayat, A. (2019). Netralitas ASN dalam Pemilu: Antara Norma dan Realita. *Jurnal Wacana Politik*, 4(1), 66–82.

- Irawan. "Pemidanaan ASN yang Tidak Netral dalam Pilkada: Studi Putusan Pengadilan." *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 14 No. 2 (2023).
- Irwansyah. "Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 3 (2018).
- Kurniawan, A. (2018). Netralitas ASN dan Tantangan Penegakan Hukum pada Pemilu. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 25(1), 130–152.
- Lestari, P. (2020). Dinamika Netralitas ASN dalam Pilkada di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 13(2), 133–148.
- Lubis, H. (2019). Netralitas ASN dalam Pemilu: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Yustisia*, 8(1), 101–120.
- M. Lutfi. "Pelanggaran Etik ASN dalam Kontestasi Politik." *Jurnal Etika dan Hukum*, Vol. 7 No. 2 (2021).
- Mahendra, I. (2020). Politik Birokrasi dan Netralitas ASN: Sebuah Tantangan Demokrasi Lokal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 7(2), 200–218.
- Marthen Arie. "Tanggung Jawab Hukum ASN dalam Pelaksanaan Pilkada." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 1 (2019).
- Montheza, Rizki, Ahsani Taqwm Aminuddin, & Tryan Nugraha. (2024). "Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kontestasi Pemilu 2024: Studi Kasus Instagram @abdimuda_id." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 5(2), 247–265.
- Nugraha, Bambang & Septiana Lestari. (2024). "Sanksi Hukum terhadap ASN Tidak Netral pada Pemilu: Perspektif Penegakan Hukum Progresif." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 18(1), 21–39.
- Nugroho, B. (2019). Penegakan Netralitas ASN dalam Pemilu Serentak. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 215–234.
- Nur Hidayah. "Analisis Putusan Hakim terhadap Pelanggaran Netralitas ASN." *Jurnal Yudisial*, Vol. 13 No. 1 (2020).
- Nurhadi, M. (2021). Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pilkada dan Implikasinya terhadap Demokrasi. *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*, 21(3), 251–266.
- Prabowoadi, Indrawan Susilo & Muhammad Afandi. (2020). "Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Pemilu dan Pilkada." *Jurnal Bawaslu Kepulauan Riau*, 2(2), 127–146.
- Prasetyo, A. (2019). Netralitas ASN sebagai Pilar Good Governance. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(4), 402–418.

- Purnomo, H. (2019). Netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah: Antara Idealitas dan Realitas. *Jurnal Ius Politicum*, 14(2), 233–248.
- Putri, Melani Kartika. (2023). "Netralitas ASN dalam Pilkada Serentak: Antara Regulasi dan Realitas." *Jurnal Konstitusi*, 20(3), 589–610.
- Putri, N. (2021). Problematika Netralitas ASN dalam Perspektif Etika Administrasi Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(1), 75–92.
- Rachman, Arief. (2021). "Netralitas ASN dan Tantangan Demokrasi Elektoral di Indonesia." *Jurnal Politik Indonesia*, 6(2), 101–120.
- Rahayu, T. S. (2020). Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu di Indonesia: Antara Idealitas dan Realitas. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 511–528.
- Rahayu, T. S. (2020). Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu di Indonesia: Antara Idealitas dan Realitas. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 511–528.
- Rahman, A. (2021). Pelanggaran Netralitas ASN dan Tantangan Penegakan Hukum di Daerah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Daerah*, 3(2), 122–139.
- Rahman, Fadli. (2022). "Delik Formil dalam Tindak Pidana Pemilu: Studi atas Putusan Pengadilan Negeri dalam Kasus Netralitas ASN." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(1), 45–67.
- Ramadhan, M. A. (2021). Netralitas ASN dalam Pilkada dan Relevansinya dengan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 205–222.
- Ratna Puspitasari. "Netralitas ASN dan Demokrasi Lokal." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 No. 2 (2022).
- Santoso, M. A. (2022). Efektivitas Sanksi Hukum terhadap Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pemilu. *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, 7(3), 415–432.
- Saputra, R. (2022). Politik Birokrasi dan Netralitas ASN dalam Pilkada. *Jurnal Politik Profetik*, 10(2), 165–183.
- Sari, D. A. (2020). Analisis Yuridis terhadap Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pemilu. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), 311–328.
- Sari, R. & Prabowo, T. (2022). Analisis Yuridis Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pemilu: Studi Putusan Pengadilan. *Jurnal Yustisia*, 13(1), 65–84.
- Sihombing, J. (2022). Penerapan Sanksi Pidana terhadap ASN dalam Pilkada: Analisis Yuridis. *Jurnal Hukum Ius Civile*, 6(1), 45–67.
- Siregar, D. (2022). Netralitas ASN dalam Pilkada: Kajian Putusan Pengadilan. *Jurnal Yustisia*, 11(2), 98–115.
- Sumarlin, Willi, Reni Rentika Waty, Siska Andrianika, & Endiyanto Yoga Prasetya. (2024). "Dinamika Netralitas ASN dalam Partisipasi dan Dukungan Politik

Menuju Pilkada Serentak 2024.” *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 5(2), 223–246.

Supriyanto, E. (2020). Peran Bawaslu dalam Menjaga Netralitas ASN pada Pemilu Serentak. *Jurnal Ilmiah Politik dan Pemerintahan*, 12(1), 44–60.

Suwandi. “Kepastian Hukum dalam Penegakan Netralitas ASN pada Pilkada Serentak.” *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9 No. 3 (2020).

Syarifuddin. “Aspek Hukum Netralitas ASN dalam Sistem Demokrasi Indonesia.” *Hasanuddin Law Review*, Vol. 6 No. 2 (2020).

Utami, D. (2020). Netralitas ASN sebagai Pilar Demokrasi: Studi Kasus Pelanggaran pada Pilkada Serentak. *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*, 18(1), 51–70.

Wahyudi, D. (2021). Penegakan Netralitas ASN pada Pilkada Serentak: Perspektif Bawaslu. *Jurnal Ilmiah Sosial Politik*, 9(1), 97–112.

Widodo, J. (2021). Netralitas ASN dan Problematika Penegakan Hukum dalam Pemilu Serentak. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 278–296.

Wulandari, E. (2021). Peran Bawaslu dalam Mengawasi Netralitas ASN pada Pilkada Serentak. *Jurnal Ius Publicum*, 2(1), 88–105.

Yulianto, Dwi. (2021). “Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pemilu: Analisis Hukum dan Dampaknya terhadap Demokrasi Lokal.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(4), 913–934.

Yulianto, T. (2018). Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 6(2), 225–240.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas ASN.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menpan RB, BKN, KASN, Bawaslu Tahun 2020 tentang Netralitas ASN dalam Pilkada.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Trt.